
**Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-
Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah
Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara**

Dewi Kurniasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Indonesia
email: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Makmur Umar

Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan, Universitas Satyagama, Indonesia
email: makmurumar.1990@gmail.com

Dikirim; 12-02-2022; Direvisi:07-03-2022; Diterima;12-05-2022

ABSTRACT

The purpose of this research was to measured the effect of implementation policy about the Indonesia-Malaysia border area on the effectiveness of regional resilience in Nunukan Regency, North Kalimantan.

This research was used an explanatory method and used a quantitative approach. Data collection techniques of this research through a questionnaire. Before the questionnaire distributed to a number of respondents, the validity and reliability tests were carried out on the research instrument (questionnaire). The respondents of this study amounted to 125 people. While the data analysis technique used was a simple linear regression analysis technique.

This study showed that the average score of respondents' overall responses to the variable implementation of border area policies was 4.31 on a scale of 1 – 5. This result was indicates that the border area management policy in Nunukan Regency had been implemented properly. Meanwhile, the overall average score of respondents' responses for the Regional Resilience effectiveness variable was 4.57 on a scale of 1 – 5. Since the average value was closer to the score of 5, it could be concluded that security of the border area in Nunukan Regency was very effective. Thus, the policy implementation of Indonesia-Malaysia border area simultaneously affected the effectiveness of regional resilience in Nunukan Regency, North Kalimantan Province by 4,153 with a significance value close to zero. This showed that the better of policy implementation, the more effective regional resilience in the Indonesia-Malaysia border area would be.

Keywords: Policy Implementation; Border Areal Effectiveness ; Regional Resilience .

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ingin mengukur seberapa besar pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan kawasan perbatasan antara Indonesia dan malaysia, terkait dengan ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Metode eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan oleh peneliti, data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Sebelum kuesioner disebar ke sejumlah responden, dilaksanakan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian tersebut. Jumlah responden dalam kajian ini adalah 125 orang, dengan teknik analisis regresi linier sederhana.

Kajian ini menunjukkan hasil rata-rata skor tanggapan responden untuk variabel implementasi kebijakan kawasan perbatasan sebesar 4,31 dengan skala 1 – 5. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah diimplementasikan dengan baik, sedangkan rata-rata skor dari tanggapan responden untuk variabel efektivitas ketahanan wilayah sebesar 4,57 dengan skala 1 – 5, dengan skor rata-rata menuju angka 5, maka dapat disimpulkan bahwa pertahanan wilayah di kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sangat efektif. Oleh karena itu mplementasi kebijakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,153 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan akan membuat ketahanan wilayah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia semakin efektif.

Keywords: *Implementasi Kebijakan; Kawasan Perbatasan; Efektivitas; Ketahanan Wilayah.*

PENGANTAR

Pada konteks hubungan antara bangsa di era globalisasi, disertai dengan kemajuan teknologi telah menjadikan dunia tanpa batas. Pemerintah dan masyarakat dari negara lain dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dan bahkan menetapkan kegiatan bidang hukum, politik, ekonomi, internal dan keamanan suatu negara. Bahkan, kebijakan secara internal pada suatu negara bisa jadi memiliki konsekuensi terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta keamanan bagi negara lainnya. Hal ini tentu berimplikasi pada pengelolaan kawasan perbatasan. Ekstensitas dan intensitas pergerakan barang dan jasa, orang dan berkembangnya jaringan sosial yang bersifat lintas batas menuntut pola manajemen baru dalam mengelola kawasan perbatasan ini.

Beberapa negara seperti Amerika dan Uni Eropa telah mengalami pergeseran dalam membuat kebijakan. Pada awalnya, penanganan masalah dan manajemen kawasan perbatasan, bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas militer atau keamanan nasional yang dijadikan sebagai kekuatan pelindung rakyat dan wilayah teritorialnya dari intervensi kekuatan lain. Namun saat ini, telah bergeser pada model kebijakan baru yang fokus kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan sejumlah

kawasan perbatasan yang dimiliki Indonesia, sangat diperlukan upaya untuk menjaga kedaulatan negara kita dari berbagai potensi ancaman negara lain. Kawasan perbatasan terdiri dari pola sebaran penduduk yang tidak merata serta menjadi salah satu wilayah binaan yang luas. Hal ini menyebabkan proses pembinaan teritorial, pengawasan serta rentang kendali pemerintah yang cukup sulit dilaksanakan secara efisien dan mantap (Mulyawan, 2012). Selain itu, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan, sebagai wajah terluar dari wilayah Indonesia, yang seharusnya menjadi cerminan kondisi yang sejahtera dan tentu saja aman sentosa (Raharjo, 2013).

Pengembangan wilayah perbatasan sebenarnya telah mendapatkan perhatian dan prioritas Pemerintah Pusat. Pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan melalui penerbitan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Wilayah Negara, selain itu muncul juga Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Implementasi kebijakan tentang pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan penerbitan perundang-undangan maupun Peraturan Presiden memiliki tujuan strategis, yaitu agar terwujudnya kesejahteraan

bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan jaminan efektivitas keamanan nasional yang utuh (Oping, 2018).

Jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, adalah 199.090 dengan luas wilayah 14.493 km² (berdasarkan Data Pusat Statistik Kabupaten Nunukan Tahun 2020). Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, menjelaskan bahwa Kabupaten Nunukan terwujud dari hasil pemekaran wilayah, yang Ketika itu menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan Provinsi, Kalimantan Utara. Pada perkembangannya sampai dengan tahun 2019, Kabupaten Nunukan memiliki 19 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa yang secara geografis adalah daerah yang memiliki kawasan perbatasan antar negara.

Dari aspek efektivitas keamanan nasional, berdasarkan observasi awal bahwa pada kawasan perbatasan dimaksud masih dihadapkan kepada masalah yang masih muncul dari kegiatan lintas batas menimbulkan potensi ancaman kerentanan kriminal. Hal ini disebabkan arus lalu lintas barang, jasa maupun orang dari dalam dan luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Negara Malaysia sebagai negara yang bertetangga. Petunjuknya dapat dilihat pada perdagangan barang ilegal dalam hal jenis dan jumlah yang melebihi kapasitas. Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah transit legal dan ilegal bagi Tenaga Kerja yang berasal dari Indonesia (TKI) yang akan bekerja di Negara Malaysia melalui pelabuhan Nunukan atau Sebatik, telah memberi warna unik bagi hubungan internasional Indonesia karena akses sosialnya (Putra, 2015). Indikasi lainnya juga telah ditemukan, seperti adanya perlintasan perbatasan ilegal yang sering

digunakan oleh buronan kriminal sebagai tempat untuk mereka bersembunyi, serta sering dijadikan jalur untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang, perlengkapan senjata ringan (*Small Arm And Light Weapon/SALW*), maupun barang-barang ilegal lainnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang berbagai cara dan bentuk penyelundupan barang ilegal berkontribusi cukup besar terhadap hal tersebut. Pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk dan cara penyelundupan senjata secara ilegal harus disampaikan khususnya kepada pegawai perusahaan angkutan barang dan jasa kurir. Penyedia jasa di daerah rawan yang menjadi sasaran para penyelundup untuk membawa barang ilegal (Gultom, 2018). Potensi ancaman keamanan wilayah ini tentunya sangat berbahaya dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat maupun Pemerintah Indonesia. Adanya perhatian dari Pemerintah Pusat dan daerah bermanfaat sehingga masyarakat di kawasan perbatasan dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara aman dan juga nyaman. Demikian pula, kemungkinan di bidang ini sangat besar, tetapi tidak dapat sepenuhnya dipantau dan dikembangkan. Pulau Sebatik merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Nunukan yang secara langsung berbatasan dengan Kota Tawau di Negara Bagian Sabah, Negara Malaysia. Kalau dilihat secara langsung, terjadi ketimpangan pembangunan antara Nunukan dengan Tawau. Ketimpangan ini menyebabkan suatu ketergantungan masyarakat Nunukan khususnya Pulau Sebatik terhadap Kota Tawau. Tak heran bila berbagai aktivitas ilegal terjadi di kawasan perbatasan yang lama kelamaan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan berbagai tindakan kerawanan sosial dalam jangka panjang.

Atas dasar itulah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?. Dasar pemikiran inilah yang menjadi tema penelitian ini dan akan mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah mengenai kawasan perbatasan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Terkait dengan penelitian ini, tinjauan pustaka dapat dijelaskan pada penjelasan berikut.

Grindle (1980) menjelaskan jika implementasi kebijakan adalah sebuah proses dari sebuah tindakan administratif yang bisa diselidiki pada tingkat sebuah program. Sebelum suatu kebijakan diimplementasi, ditetapkan terlebih dahulu tujuan serta sasaran dari kebijakan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan kegiatan yang dikonstruksi, serta mempersiapkan dana dan didistribusikan untuk mencapai tujuan.

Meter dan Horn (1975:447) berpandangan jika implementasi kebijakan lebih menekankan pada sebuah tindakan masyarakat umum, individu, maupun pejabat, serta kelompok pemerintah, pihak swasta, yang bergerak bersama dan diarahkan untuk pencapaian tujuan dalam sebuah kebijakan. Semua lembaga di atas menjalankan fungsi pemerintahan yang mempengaruhi warga negara, namun pada kenyataannya, instansi

pemerintah seringkali dihadapkan pada kewajiban hukum, yang menyebabkan ketidakjelasan sebuah tindakan.

Penjelasan di atas memberikan gambaran tentang sebuah implementasi kebijakan yang mana menjadi proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah, selain itu keputusan yang dijalankan akan mengarah pada sebuah pencapaian tujuan yang telah disepakati dahulu.

Menurut Grindle (1980) dalam Wahab (2008), menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam sebuah proses dalam pembuatan sebuah kebijakan. Pelaksanaan sebuah kebijakan bukan hanya berkaitan dengan mekanisme untuk dapat mengubah keputusan dari sebuah kebijakan menjadi suatu prosedur yang menjadi rutinitas pelaksana kebijakan melalui saran yang diberikan oleh pihak birokrasi. Lebih dari itu, implementasi membahas pula berbagai permasalahan yang menjadi suatu konflik, serta siapa saja pihak yang menjadi penerima kebijakan yang sudah tercipta.

Meter dan Horn (1975:446) selanjutnya mengemukakan beberapa model komponen dalam implementasi kebijakan, yaitu (1). *An environment that both stimulates government officials and receives the product of their work;*(2). *Demands and resources that carry stimuli from the environment to policy makers;*(3). *A conversions process, including the formal structures and procedures of government, that transforms (converts) demands and resources into public policies;* (4). *The policies that represent the formal goals, intentions, or statements of government officials;*(5). *The performance of the policy as it is actually delivered to clients;* and (6). *The feedback of policies and performances to the*

environment, which is transmitted back to the conversions process as demands and resources of a later point in time.

Keenam variabel tersebut digunakan untuk menggambarkan proses dengan memeriksa bagaimana keputusan kebijakan diimplementasikan dan dibandingkan, Selain variabel tersebut, terdapat beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan yaitu: faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, komunikasi, serta struktur dari birokrasi dimana turut berkontribusi bagi keberhasilan suatu kebijakan (Kurniasih, Fidowaty dan Sukaesih, 2017).

Kebijakan terkait pembangunan pada wilayah perbatasan, pemerintah harus memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakannya sebagai suatu wujud tanggung jawab menjaga kedaulatan negara terutama di wilayah perbatasan, sedangkan bentuk dari suatu demokrasi pemerintah dapat memperhatikan setiap aspirasi dari setiap wilayah perbatasan dimana masing-masing wilayah perbatasan memiliki ciri khasnya tersendiri dan wilayah yang strategis (Arifin, 2013).

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan dan keamanan negara, karena wilayah atau kawasan perbatasan negara memiliki peran tersendiri serta memiliki muatan nilai yang sangat strategis terutama sebagai upaya untuk mendukung tegaknya kedaulatan sebuah negara (Rani, 2012).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan amanat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan pada akhirnya mampu memperkuat kondisi ketahanan

masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Kawasan perbatasan sudah tentu memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, hal tersebut dikarenakan kondisi dari kawasan perbatasan yang baik akan mendukung ketahanan nasional dalam NKRI.

Posisi geografis dari Pulau Sebatik ini yang langsung berbatasan dengan Kota Tawau Malaysia, maka memerlukan berbagai pendekatan yang tepat terhadap berbagai potensi yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan bahkan ketahanan masyarakat yang kemungkinan muncul. Hal tersebut tentunya harus ditekankan betapa pentingnya memperhatikan daerah perbatasan (Siregar, Rahmansyah dan Saepudin, 2019).

Lokasi penelitian bertempat di wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan juga Malaysia, terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, yang memiliki banyak kawasan pantai dan laut. Hal ini tentu memerlukan perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut. Kawasan ini adalah perlintasan masyarakat dan pelayaran umum yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Dengan ditetapkannya jalur laut membantu mengatur arus lintas dari semua kapal yang berlayar. Selain itu, dapat memantau setiap pergerakan dari semua kapal yang akan melintas dan mengontrol dari pergerakan kapal tersebut. Penetapan jalur laut merupakan praktik dari pelaksanaan hak perlintasan damai dari berbagai kapal dari luar yang melintas di wilayah tersebut. Penetapan rute atau alur pelayaran pada dasarnya bertujuan untuk mengatur angkutan, keselamatan angkutan, dan perlindungan lingkungan maritime (Sobaruddin, Armawi dan Martono, 2017). Mempertimbangkan

vitalitas, seperti peran laut untuk Indonesia dan untuk pengguna lalu lintas maritim, keamanan laut merupakan prasyarat bagi pembangunan nasional lebih lanjut dan merupakan kunci kelangsungan hidup bangsa dan negara (Hutabarat, 2020).

Dalam konsep keamanan nasional, dikenal istilah *the origin of threats*. Keamanan maritim sebagai suatu masalah yang membutuhkan keamanan. Hal ini muncul di setiap negara dengan dampak lingkungan eksternal apa pun dan reaksi negara-negara yang melihat masalah tersebut sebagai sebuah ancaman yang perlu segera ditanggapi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan maritim telah meluas maknanya terhadap perkembangan isu-isu saat ini, sehingga menjadi semakin kompleks (Suwarno, Sumantri dan Bahar, 2021).

Melakukan pengukuran keefektifan terhadap suatu program, seperti halnya melakukan suatu proses pembangunan. Hal tersebut tentu tidaklah mudah dan sesederhana yang dibayangkan. Pembangunan merupakan suatu hal yang mencerminkan tujuan dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sangatlah luas dan abstrak serta sebagian besar secara tersirat dinyatakan sebagai milik masyarakat umum.

Arikunto (2002) menyimpulkan jika sebuah program dianggap efektif, jika telah melalui beberapa kriteria, yaitu produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*). Aspek tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan masyarakat dalam mengapresiasi sebuah program (Purwatiningsih, 2013). Steers (1985:46), menjelaskan bahwa ukuran-ukuran untuk efektivitas adalah penerimaan dan pencapaian tujuan, stabilitas, semangat kerja, dan keluwesan adaptasi.

Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) merupakan salah satu dari sub-sistem ketahanan nasional secara reguler dilakukan oleh TNI beserta jajarannya. Bintahwil merupakan sebuah pendekatan keamanan yang dilakukan dengan bertujuan pada perwujudan stabilitas dari keamanan yang bersifat dinamis. Selain itu, dilaksanakan untuk dapat meningkatkan tanggungjawab serta kepekaan masyarakat sehingga tertanggulangnya berbagai ancaman maupun gangguan yang ditimbulkan. Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) melalui pendekatan program Bakti TNI, serta melakukan Komunikasi Sosial (Komsos), dengan menganut azas-azas yang bersifat pragmatif, persuasive serta komunikatif (Anwar, 2021).

Dalam mewujudkan ketahanan nasional membutuhkan ketahanan yang berlapis. Sistem tersebut berupa lingkaran-lingkaran dimana berpusat pada ketahanan pribadi dari masing-masing individu masyarakat, ketahanan wilayah serta ketahanan nasional (Darmawan, Kasto, dan Zubaidi, 2005).

Ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah menjadi bagian dari ketahanan nasional. Hal tersebut berarti ketahanan wilayah merupakan suatu kondisi yang dinamik dari suatu wilayah dimana didalamnya meliputi segenap aspek kehidupan suatu wilayah. Ketahanan wilayah terintegrasi pada keuletan serta ketangguhan terutama mengandung kemampuan dalam pengembangan kekuatan wilayah terutama dalam mengatasi serta menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang datang, begitu pula dengan berbagai hambatan serta gangguan yang kemungkinan hadir dari luar maupun dalam negara. Dimana hal tersebut terjadi untuk mampu menjamin

identitas bangsa dan kelangsungan hidup rakyat serta integritas bangsa dan negara dan perjuangan dalam mencapai tujuan nasional (Susilo, Ritohardoyo, dan Zubaidi, 2019).

Perbatasan menjadi strategis, terutama berkaitan dengan penciptaan stabilitas keamanan, sosial, serta ekonomi (Siregar, Rahmansyah dan Saepudin, 2019), sehingga ketahanan keamanan wilayah, sosial dan ekonomi harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Fokus dalam kajian ini adalah pada ketahanan keamanannya.

Hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: Terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas ketahanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Semakin efektif implementasi kebijakan maka semakin meningkat efektivitas ketahanannya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanasi, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, berdasarkan

fakta serta yang telah diverifikasi serta diuji keabsahannya, melalui mekanisme uji statistika. Penelitian ini terdiri dua variabel yaitu variabel X (Implementasi Kebijakan wilayah perbatasan) sebagai variabel independen dan variabel Y (Efektivitas Ketahanan Wilayah) sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Imigrasi, Polres, Kodim, Dan Lanal, Bappeda, BNPP, DPRD, dan Tokoh Masyarakat. Jumlah sampel dalam kajian ini menggunakan error 10% seperti penjelasan rumus Solvin, berjumlah 125 orang. Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang sebuah hal yang dikaji digunakan skala Likert, dan kajian ini menggunakan model analisis regresi linear sederhana.

Operasionalisasi variabel implementasi kebijakan (X) adalah skor yang diperoleh dari responden dalam menjawab kuesioner dengan 19 item pernyataan secara terstruktur dan parameter pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5 positif, 5-1 negatif. Kisi-kisi variabel X ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Kisi-kisi Variabel Penelitian Implementasi Kebijakan (X)

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;	1. Kecermatan dan kejelasan 2. Tujuan pelaksanaan kebijakan 3. Sasaran dari kebijakan
	2. Sumber-sumber kebijakan;	1. Pemanfaatan sumber daya manusia 2. Biaya 3. Waktu
	3. Karakteristik Badan-badan pelaksana;	1. Kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, 2. Tingkat pendidikan, Komitmen 3. Kejujuran 4. Sifat demokratis
	4. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik;	1. Ketetapan, alokasi sumber dana 2. Dukungan public 3. Kondisi Ekonomi Daerah
	5. Sikap para pelaksana;	1. Struktur birokrasi 2. Norma-norma 3. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
	6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi

Sumber : Metter dan Horn (1975:462-478)

Operasionalisasi variabel efektivitas ketahanan wilayah (Y) adalah skor yang diperoleh dari responden dalam menjawab kuesioner dengan 11 item pernyataan secara terstruktur dan parameter pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5 positif, 5-1 negatif. Kisi-kisi variabel Y ditunjukkan dalam Tabel 2.

PEMBAHASAN

Kabupaten Nunukan memiliki wilayah seluas 14.263,68 km². Secara administratif

Kabupaten Nunukan memiliki perbatasan wilayah yaitu (1). Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur – Sabah; (2). Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi; (3). Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau; dan (4). Sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur – Serawak (Lihat Gambar 1).

Kabupaten Nunukan secara geografis berpotensi untuk dikembangkan dalam kegiatan internasional, khususnya Negara Malaysia, sebagai cerminan kemajuan

Tabel 2
Kisi-kisi Variabel Penelitian
Efektivitas Ketahanan Wilayah (Y)

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Ketahanan Wilayah	1. Penerimaan atau pencapaian tujuan	1. Proses pembinaan masyarakat 2. Pelaksanaan prosedur keamanan sesuai tujuan 3. Ketepatan penyelesaian konflik di masyarakat.
	2. Stabilitas	1. Pelaksanaan pengamanan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. 2. Tiap-tiap aparat melaksanakan tugas sesuai dengan <i>job description</i> masing-masing. 3. Pemberitahuan prosedur yang harus dijalani untuk pengamanan di masyarakat.
	3. Semangat Kerja	1. Penciptaan rasa kebersamaan para aparat saat melaksanakan tugas 2. Suasana kerja yang nyaman 3. Kepemimpinan
	4. Keluwesan Adaptasi	1. Inisiatif pimpinan maupun pegawai dalam menyelesaikan tugas. 2. Kesesuaian prosedur pelaksanaan tugas dengan kondisi lapangan.

Sumber: Steers (1985:46)

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Nunukan



Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka, 2020.

pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Nunukan memiliki sejarah hubungan yang panjang dengan Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, terkait hubungan perdagangan dan juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini disanyalir dapat memberikan dampak bagi peredaran uang, yang mana transaksi dengan menggunakan mata uang ringgit Malaysia relatif lebih tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi fluktuasi indeks harga spasial berdasarkan jenis komoditas dan jasa yang berbeda. Dari sisi konsumen dan produsen dapat menyebabkan tingginya inflasi regional.

Pada tahun 2019, terdapat 19 kecamatan di wilayah Kecamatan Sebatik Utara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi disusul oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan 358,28 jiwa/km².

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian yang dilakukan untuk mengenali apakah alat ukur yang telah dirancang ke dalam kuesioner sudah betul-betul dapat digunakan disebut dengan uji validitas. Sedangkan untuk menguji valid tidaknya kuesioer yang dibuat melalui pendekatan nilai koefisien korelasi. Item pernyataan dianggap valid apabila koefisien korelasi lebih besar ataupun sama dengan 0,176 (rtabel). Bersumber pada hasil pengolahan informasi memakai korelasi *product moment* (rhitung) diperoleh hasil uji validitas, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) pada setiap item pernyataan variabel implementasi kebijakan lebih besar dari nilai kritis 0.3. Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk setiap pernyataan

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian

Kuesioner	Butir Pernyataan	r_{hitung}	Keterangan
Implementasi Kebijakan	Item 1	0,594	Valid
	Item 2	0,515	Valid
	Item 3	0,499	Valid
	Item 4	0,509	Valid
	Item 5	0,583	Valid
	Item 6	0,595	Valid
	Item 7	0,552	Valid
	Item 8	0,635	Valid
	Item 9	0,545	Valid
	Item 10	0,650	Valid
	Item 11	0,403	Valid
	Item 12	0,703	Valid
	Item 13	0,696	Valid
	Item 14	0,618	Valid
	Item 15	0,549	Valid
	Item 16	0,419	Valid
	Item 17	0,604	Valid
	Item 18	0,467	Valid
	Item 19	0,590	Valid
Efektivitas Ketahanan Wilayah	Item 20	0,501	Valid
	Item 21	0,647	Valid
	Item 22	0,645	Valid
	Item 23	0,585	Valid
	Item 24	0,651	Valid
	Item 25	0,669	Valid
	Item 26	0,272	Valid
	Item 27	0,590	Valid
	Item 28	0,676	Valid
	Item 29	0,644	Valid
	Item 30	0,687	Valid

Sumber : Data hasil penyebaran kuesioner 2021, Diolah peneliti

dalam kuesioner penelitian tersebut valid. Selain itu, setiap item pernyataan sudah dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian sehingga dapat ditindaklanjuti dalam analisis lebih lanjut.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan. Jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali dan memberikan hasil yang relatif sama, maka alat ukur tersebut dapat diandalkan (tidak jauh berbeda). Pendekatan statistik, atau faktor reliabilitas, digunakan

untuk menguji reliabilitas instrumen. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan *reliable*. Batas minimal sebesar 0,70 sehingga dikatakan tepat dalam memilih alat ukur (Barker, dkk, 2016) (Lihat Tabel 4).

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Kuesioner	Cronbach's Alpha	Keterangan
Implementasi Kebijakan	0,905	Reliabel
Efektivitas Keamanan	0,880	Reliabel

Sumber: Data hasil penyebaran kuesioner, 2021, Diolah peneliti.

Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dilihat nilai koefisien reliabilitas (*Alpha-Cronbach's*) kuesioner kedua variabel lebih besar dari nilai kritis 0,7 dan dinyatakan reliabel. Pengujian menunjukkan bahwa semua item dari pernyataan yang diajukan oleh peneliti telah reliabel. Hal tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur kelima variabel penelitian sudah memberikan hasil yang reliabel.

Analisis Deskriptif Implementasi Kebijakan

Analisis deskriptif bertujuan supaya dapat memperkaya pembahasan dalam sebuah penelitian. Melalui analisis deskriptif, melalui pemilihan keadaan sebuah variabel yang akan diteliti. Menurut Cooper dan Schindler (2014), bahwa analisis deskriptif bisa digunakan untuk mengukur gejala sentral dan mengukur variabilitas. Dalam penelitian ini, digunakan nilai rata-rata untuk menggambarkan keadaan setiap variabel.

Variabel implementasi kebijakan diukur menggunakan 6 dimensi dan dioperasionalisasikan melalui 19 indikator, pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor jawaban antara 1 (terendah)

sampai dengan 5 (tertinggi). Statistik deskriptif hasil jawaban responden terkait implementai kebijakan ditunjukkan pada Tabel 5..

Tabel 5 tersebut menjelaskan bahwa rerata skor dari tanggapan responden secara keseluruhan, untuk variabel implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan sebesar 4,31 dengan skala 1 – 5. Dikarenakan mendekati skor 4 maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah diimplementasikan dengan baik. Di antara keenam dimensi variabel implementasi kebijakan, dimensi kebijakan tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,36 (baik), sebaliknya dimensi ukuran dasar dan tujuan kebijakan memiliki rata-rata terendah yaitu sebesar 4,24 (baik).

Pada dimensi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, diperoleh rerata skor tanggapan responden sebesar 4,24 mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori baik. Sebagian besar responden sependapat bahwa kecermatan dan kejelasan sudah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, sehingga terwujud tujuan tersebut. Sasaran dari kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan juga sudah jelas.

Pada dimensi sumber-sumber kebijakan, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,33 lebih mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori baik. Sebagian besar responden sependapat dengan pemanfaatan sumber daya manusia dalam tata kelola kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan. Kemudian biaya dalam pelaksanaan kebijakan tatakelola kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah dialokasikan seoptimal mungkin. Demikian juga waktu yang

Tabel 5
Statistik Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan

No.	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah Skor	Mean Skor
		SS	S	KS	TS	STS		
1	Kecermatan dan kejelasan	30	89	6	0	0	524	4,19
2	Tujuan pelaksanaan kebijakan	27	94	4	0	0	523	4,18
3	Sasaran dari kebijakan	45	78	2	0	0	543	4,34
Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan							1590	4,24
4	Pemanfaatan sumber daya manusia	53	69	3	0	0	550	4,40
5	Biaya	61	54	6	3	1	546	4,37
6	Waktu	35	83	6	0	1	526	4,21
Sumber-sumber kebijakan							1622	4,33
7	Kualitas atau ciri-ciri dari para aktor	44	80	1	0	0	543	4,34
8	Tingkat pendidikan, Komitmen	43	79	3	0	0	540	4,32
9	Kejujuran	54	67	4	0	0	550	4,40
10	Sifat demokratis	39	79	4	3	0	529	4,23
Karakteristik Badan-badan pelaksana							2162	4,32
11	Ketetapan, alokasi sumber dana	81	41	3	0	0	578	4,62
12	Dukungan public	36	78	6	4	1	519	4,15
13	Kondisi Ekonomi Daerah	43	77	5	0	0	538	4,30
Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik							1635	4,36
14	Struktur birokrasi	43	68	6	0	8	513	4,10
15	Norma-norma	68	37	15	0	5	538	4,30
16	Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi	67	51	7	0	0	560	4,48
Sikap para pelaksana							1611	4,30
17	Transmisi	45	73	6	0	1	536	4,29
18	Kejelasan	48	73	2	0	2	540	4,32
19	Konsistensi	75	37	7	0	6	550	4,40
Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kegiatan							1626	4,34
Variabel Implementasi Kebijakan							10246	4,31

Sumber : Data hasil penyebaran kuesioner, 2021, Diolah peneliti.

digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah ditekan seoptimal mungkin.

Pada dimensi karakteristik badan-badan pelaksana, diperoleh rerata skor tanggapan responden sebesar 4,34 telah mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori sesuai. Sebagian besar responden sependapat bahwa aparatur untuk mendukung kebijakan tersebut sudah berkualitas. Kemudian komitmen ditentukan berdasarkan tujuan ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Sifat demokratis dari setiap aktor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan tetap dijaga. Demikian juga kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tetap diawasi.

Pada dimensi kondisi ekonomi, sosial dan politik, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,36 lebih mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori mendukung. Sebagian besar responden sependapat bahwa dukungan publik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Nunukan. Kemudian aspirasi dari masyarakat menjadi masukan atau pertimbangan pelaksanaan penentuan kebijakan. Demikian juga alokasi modal maupun sumber daya ekonomi yang tersedia dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dimensi sikap para pelaksana, diperoleh rata-rata skor dari tanggapan

responden yaitu sebesar 4,30 lebih mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori mendukung. Sebagian besar responden sependapat bahwa struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan perbatasan sudah melaksanakan setiap tugas sebagaimana dengan ketentuan. Kemudian norma-norma atau aturan yang ada mempengaruhi sikap para pelaksana kebijakan. Demikian juga pola hubungan para pelaksana kebijakan mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Pada dimensi komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,34 lebih mendekati skor 4 dan termasuk dalam kategori baik. Sebagian besar responden sependapat bahwa kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Kemudian konsistensi pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Demikian juga dengan

transmisi sudah digunakan untuk memastikan informasi sampai secara akurat.

Analisis Deskriptif Efektivitas Ketahanan Wilayah

Variabel efektivitas ketahanan wilayah dioperasionalkan menjadi 11 butir pernyataan dan diukur menggunakan 4 dimensi, pengukuran menggunakan skala Likert dengan rentang antara 1 – 5. Statistik deskriptif hasil tanggapan responden berkaitan dengan efektivitas ketahanan wilayah kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan ditunjukkan pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa rerata skor tanggapan responden secara keseluruhan untuk variabel efektivitas ketahanan wilayah adalah 4,57 pada skala 1 sampai 5, dikarenakan nilai rerata telah mendekati skor 5, sehingga bisa disimpulkan bahwa ketahanan wilayah kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sangat efektif. Di antara keempat dimensi

Tabel 6
Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Ketahanan Wilayah

No.	Indikator	Alternatif Jawaban					Jumlah Skor	Mean Skor
		SS	S	RR	TS	STS		
1	Proses pembinaan masyarakat	76	47	2	0	0	574	4,59
2	Pelaksanaan prosedur keamanan sesuai tujuan	60	64	1	0	0	559	4,47
3	Ketepatan penyelesaian konflik di masyarakat	64	60	1	0	0	563	4,50
	Penerimaan atau pencapaian tujuan						1696	4,52
4	Pelaksanaan pengamanan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.	86	37	2	0	0	584	4,67
5	Tiap-tiap aparat melaksanakan tugas sesuai dengan job description masing-masing.	78	46	1	0	0	577	4,62
6	Pemberitahuan prosedur yang harus dijalani untuk pengamanan di masyarakat	50	71	3	0	1	544	4,35
	Stabilitas						1705	4,55
7	Penciptaan rasa kebersamaan para aparat saat melaksanakan tugas	61	63	0	0	1	558	4,46
8	Suasana kerja yang nyaman	82	42	1	0	0	581	4,65
9	Kepemimpinan	87	38	0	0	0	587	4,70
	Semangat Kerja						1726	4,60
10	Inisiatif pimpinan maupun pegawai dalam menyelesaikan tugas.	84	40	0	0	1	581	4,65
11	Kesesuaian prosedur pelaksanaan tugas dengan kondisi lapangan.	82	40	2	0	1	577	4,62
	Keluwesannya Adaptasi						1158	4,63
	Variabel Efektivitas Keamanan						6285	4,57

Sumber: Data hasil penyebaran kuesioner, 2021, Diolah peneliti.

variabel efektivitas ketahanan wilayah, dimensi keluwesan adaptasi memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,63 (sangat efektif), sebaliknya dimensi penerimaan atau pencapaian tujuan memiliki rata-rata terendah yaitu sebesar 4,52 (sangat efektif).

Pada dimensi penerimaan atau pencapaian tujuan, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,52 lebih mendekati skor 5 dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebagian besar responden sependapat dengan proses pembinaan masyarakat dalam menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Kemudian sependapat dengan pelaksanaan prosedur ketahanan wilayah sesuai tujuan dalam menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Demikian juga dengan ketepatan penyelesaian konflik di masyarakat dalam menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Pada dimensi stabilitas, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,55 lebih mendekati skor 5 dan termasuk dalam kategori sangat stabil. Sebagian besar responden sependapat bahwa pelaksanaan pengamanan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan, lalu banyak yang sependapat jika setiap aparat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan *job description*, serta menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Demikian juga dengan pemberitahuan prosedur yang harus dijalani untuk pengamanan di masyarakat dalam menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Pada dimensi semangat kerja, diperoleh rerata sebesar 4,60 sehingga mendekati skor 5 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Sebagian besar responden sependapat dengan penciptaan rasa kebersamaan para aparat saat melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nunukan. Kemudian sependapat dengan suasana kerja yang nyaman dalam menjaga ketahanan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Demikian juga dengan kepemimpinan optimal dalam menjaga ketahanan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Pada dimensi keluwesan adaptasi, diperoleh rata-rata skor tanggapan responden sebesar 4,63 lebih mendekati skor 5 dan termasuk dalam kategori sangat luwes. Sebagian besar responden sependapat dengan inisiatif pimpinan maupun pegawai dalam menyelesaikan tugas pengamanan di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Kemudian juga sependapat dengan kesesuaian prosedur pelaksanaan tugas dengan kondisi lapangan.

Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh implementasi kebijakan kawasan perbatasan terhadap efektivitas ketahanan wilayah. Berikut merupakan tahapan dari pengujian yang menggunakan analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis serta perhitungan koefisien determinasi.

Pertama, analisis regresi linier sederhana. Model persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan fungsional antara efektivitas ketahanan wilayah kawasan perbatasan dengan implementasi kebijakan. Estimasi persamaan model regresi linier sederhana menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22* diperoleh output sebagaimana ditunjukkan Tabel 7.

Berdasarkan nilai *unstandardized coefficients* seperti disajikan pada Tabel

Tabel 7
 Hasil Analisis Regresi Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,944	,262		7,423	,000
	X1	,609	,060	,672	10,076	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Olahan Peneliti

7, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 1,944 + 0,609 X_1$

(Dimana : Y = Efektivitas ketahanan wilayah, dan X_1 = Implementasi kebijakan).

Pada persamaan tersebut dapat dilihat implementasi kebijakan memiliki koefisien bertanda positif, menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan akan membuat ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan semakin efektif.

Kedua, pengujian hipotesis (uji t). Guna melihat apakah implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah, maka peneliti melakukan pengujian dengan hipotesis statistik, yaitu (1). $H_0: \beta_1 = 0$, bahwa Implementasi kebijakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan. (2). $H_a: \beta_1 \neq 0$, bahwa Implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan.

Ringkasan hasil pengujian hipotesis (uji t) tersebut ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8
 Ringkasan Hasil Uji Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah

<i>Standardized Coefficients</i>	t_{hitung}	Sig.	$t_{tabel} (df=123)$	Ha
0,672	10,076	0,000	1,979	Diterima

Sumber: Tabel 7

Berdasarkan Tabel 8 tersebut, terlihat bahwa nilai t_{hitung} implementasi kebijakan terhadap efektivitas ketahanan wilayah perbatasan sebesar 10,076, dengan tingkat signifikansi yang mendekati nol. t_{hitung} yang nilainya lebih besar dari t_{tabel} serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05, dan tingkat kekeliruan 5% sehingga diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_1 diterima.

Kesimpulan dari hasil pengujian di atas bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa semakin baik implementasi kebijakan maka semakin efektif ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan.

Ketiga, koefisien determinasi parsial. Setelah dilakukan pengujian dan terbukti bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah kawasan perbatasan, akan dilakukan perhitungan lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan. Nilai koefisien determinasi dari pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas ketahanan wilayah, ditunjukkan pada Tabel 9.

Melalui R-Square (koefisien determinasi) diketahui bahwa 45,2% efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten

Tabel 9
Koefisien Determinasi Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Kawasan Perbatasan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,452	,448	,27032

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Olahan Peneliti

Nunukan disebabkan oleh implementasi kebijakan. Artinya implementasi kebijakan memberikan pengaruh/kontribusi sebesar 45,2% terhadap efektivitas ketahanan wilayah.

Faktor pendukung implementasi kebijakan lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat apabila hal faktor tersebut mampu memberikan peluang bahkan kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti adanya aturan yang jelas dan berjenjang. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini berkaitan dengan SDM yang rendah, maupun anggaran yang terbatas (Mirza dan Aisyah, 2020).

The border area is one of great potential for the security of each country. The borders of a country has an important role in determining the boundaries of sovereignty, use of natural resources, keeping conduciveness defense and security and territorial integrity. The determination of the state border is in many ways determined by the political, historical, national and also international laws. In the constitution of a country is often included also the determination of boundaries, so it is easy conflict occurs. The government has an obligation to pay attention to the problem conduciveness defense and security of the region (Kurniasih, dkk, 2018).

Dilihat dari tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan

adalah berupaya mensejahterakan masyarakat terutama di kawasan perbatasan yang selama ini mengalami ketertinggalan berbanding terbalik dengan kawasan perbatasan di negara tetangga. Hal tersebut menyebabkan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi dilihat dari pembangunan wilayah Kabupaten Nunukan dengan kawasan perbatasan negara Malaysia. Salah satu sebab dari ketertinggalan tersebut yaitu kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap kawasan perbatasan ini. Kebijakan kawasan perbatasan terutama dalam pembangunan di kawasan perbatasan di Kalimantan Utara masih menganggap sebagai kawasan belakang dan bukan halaman depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara bukan menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Oleh karena itu tujuan dari kebijakan pemerintah saat ini adalah pembangunan di kawasan perbatasan salah satunya melalui pembangunan pos lintas batas.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dibangun di kawasan Sei Pancang di Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Pembangunan PLBN tersebut dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR tengah merampungkannya. PLBN tersebut diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. PLBN ini diharapkan dapat menjadi awal yang baru dari seluruh pusat kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang sebelumnya merupakan kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian yang merata serta mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat setempat sehingga pada akhirnya mampu mengefektifkan ketahanan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

Sumber-sumber kebijakan dalam pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan pun telah diupayakan sebaik mungkin oleh pemerintah. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan. Kemudian biaya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah dialokasikan seoptimal mungkin. Demikian juga waktu yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah ditekan seoptimal mungkin.

Dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan, dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan. BPBD Kabupaten Nunukan memiliki tugas pokok menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten Nunukan. Optimalisasi tugas dan fungsi BPBD diharapkan mampu menjaga ketahanan wilayah di Kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh simpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di kawasan perbatasan antara negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, semakin baik dan efektif.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait kebijakan yang berlaku bagi masyarakat dan aparatur melalui media komunikasi yang ada.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu menegakkan kebijakan dengan pemberdayaan dan ketanggapan aparatur terkait, agar setiap kemungkinan pelanggaran lintas batas dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin oleh seluruh komponen aparatur, pejabat dan masyarakat di wilayah perbatasan.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu meningkatkan kesadaran dan teladan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam menjaga keutuhan NKRI.

Keempat, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu mensinergikan semua stakeholder dalam pengembangan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., 2021, 'Pemanfaatan Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pengamanan Perbatasan Kalimantan Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Wilayah', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 3, hh. 289–308.
- Arifin, S., 2013, 'Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1, hh. 37–58. doi: 10.20885/iustum.vol20.iss1.art3.
- Arikunto, S., 2002, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barker, C., N. Pistrang, dan R. Elliot, 2016, *Research Methods in Clinical Psychology. (3rd ed.)*, Chichester UK: John Wiley & Sons, LTD

- Cooper, D. R., dan P. S. Schindler, 2014, *Business Research Methods*. (12th ed.). New York: Mc Graw Hill Companies, Inc
- Darmawan, H., Kasto, dan A. Zubaidi, 2005, Pengaruh Reformasi Internal TNI Terhadap Profesionalisme Aparat Teritorial dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah. *Sosiosains*, Vol. 18. No. 4, hh. 731–743.
- Grindel, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in Third World*. New Jersey:Princeton University Press.
- Gultom, J. M., 2018, ‘Efektivitas Police To Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Filipina Dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal’, *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, hh. 472–478.
- Hutabarat, T.dkk., 2020, ‘Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Dan Keamanan Di Selat Malaka Sesuai Hukum Internasional Indonesia’, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26. No. 3, hh. 333–358.
- Kurniasih, D. dkk., 2018, ‘*Public Services and Nation Dignity in Sebatik Border Areas, Indonesia-Malaysia*’. Available at: <<https://repository.unikom.ac.id/58435/>>.
- Kurniasih, D., T. Fidowaty, dan P. Sukaesih, 2017, ‘Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi’, *Sosiohumaniora*. <<http://doi:10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5234>>.
- Meter, Donald S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio State University: Sage Publications Inc.
- Mirza dan S. Aisyah, 2020, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau’, *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan*, Vol. 01, No. 01, hh. 14–34.
- Mulyawan, R., 2012, ‘Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah Perbatasan Antaraneegara dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste)’, *Jurnal Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1.
- Oping, Jiko Siko, 2018, ‘Efektifitas Pengamanan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik Di Wilayah Perbatasan Indonesia’, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, hh. 63–69.
- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut.
- Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
- Purwatiningsih, E., 2013, ‘Efektivitas Pelaksanaan Program Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah’, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 19, No. 3, hh. 30–138. doi: 10.22146/jkn.6777.
- Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2020, *Kabupaten Nunukan Dalam Angka*
- Putra, A., 2015, ‘Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau)’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 2, hh. 308–326. doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art8.

- Raharjo, S. N. I., 2013, 'Indonesia's Policy On The Land Border Area Management With Malaysia (AN Evaluative Study In The Entikong District)', *Widyariset*, Vol. 16, No. 1, hh. 71–79.
- Rani, F., 2012, 'Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan', *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, hh. 1–17.
- Siregar, C. N., S. Rahmansyah, dan E. Saepudin, 2019, 'Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia : Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia)', *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, hh. 26–39.
- Sobaruddin, D. P., A. Armawi, dan E. Martono, 2017, 'Model Traffic Separation Scheme (TSS) Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (AIKI) Di Selat Sunda Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 1, h. 104. <[http:doi: 10.22146/jkn.22070](http://doi:10.22146/jkn.22070)>.
- Susilo, H., S. Ritohardoyo, dan A. Zubaidi, 2019, Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia Di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Geografi*, Vol. 11, No. 1. <<https://doi.org/10.24114/jg.v11i1.10668>>.
- Suwarno, P., S.H. Sumantri, dan F. Bahar, 2021, 'Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020)', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27, No. 1, hh. 65–89.
- Steers, Richard M., 1985, *Efektivitas Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Wilayah Negara.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.